

ABSTRAKSI

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel merupakan regulasi yang dibuat oleh Pemkot Yogyakarta untuk mengatasi masalah tingginya pertumbuhan hotel di Kota Yogyakarta. Dalam implementasinya, melibatkan banyak pihak dengan berbagai macam peran, kewenangan, dan kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui posisi, kewenangan, dan kepentingan dari *stakeholder* yang terlibat di dalamnya. Baik *stakeholder* yang melaksanakan implementasi maupun *stakeholder* yang terdampak.

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Yogyakarta. Sedangkan metode yang digunakan untuk memperoleh data adalah dengan observasi, wawancara, dan studi literatur. Subjek yang diteliti adalah para *stakeholder* yang berkaitan langsung dengan kebijakan moratorium. Kemudian objek yang diteliti meliputi posisi, kepentingan, dan peran dari masing-masing *stakeholder*. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan alat analisis dalam pemetaan *stakeholder* (*stakeholder mapping*), yaitu *stakeholder issue interrelationship diagrams*, *problem-frame stakeholder map*, dan *power versus interest grid*.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian menunjukkan bahwa moratorium hotel belum efektif untuk bisa menekan pertumbuhan hotel. Selain itu, *stakeholder* yang terlibat terbagi menjadi tiga kelompok. Selain itu, juga ada potensi kerjasama yang bisa dibentuk dalam rangka menyelesaikan implementasi moratorium pembangunan hotel.

Kata kunci: Stakeholder, moratorium, implementasi, stakeholder mapping

ABSTRACT

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2013 tentang Pengendalian Pembangunan Hotel is a regulation that made by Yogyakarta Mayor to solving problematic highly hotel development in Yogyakarta. Some stakeholders who have various roles, interests, and powers are involved on it implementation. This study aims to identify stakeholder's role, power, and interest. They are stakeholder that implementing the rule and also stakeholder who getting impact of the rule.

This study was conducted in Yogyakarta City. Observation, interview, and literature study are used as method to get data. The subjects are all stakeholder that have involved about the rule. Also, the objects are included position, interest, and role of each stakeholders.

These datas collected and analyzed by stakeholder mapping method instrument; such stakeholder issue interrelationship diagrams, problem-frame stakeholder map, dan power versus interest grid.

The results showed that hotel developmental moratorium hasn't effective to push hotel deveopmental yet. Besides, there are potential of cooperation that able formed to succes the implementation.

Keywords: stakeholder, moratorium, implementation, stakeholder mapping